



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

DAFTAR PERIZINAN BERUSAHA YANG DITERBITKAN OLEH
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS SELAIN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

NO	PERIZINAN BERUSAHA
I.	Perizinan Berusaha Sektor Transportasi Bidang Kepelabuhanan
	1. Izin Pelabuhan Umum
	1.1. Usaha Badan Usaha Pelabuhan
	1.2. Penetapan Lokasi Pelabuhan, berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional
	1.3. Pembangunan Pelabuhan
	1.4. Pengoperasian Pelabuhan
	2. Izin Terminal Khusus
	2.1. Penetapan Lokasi
	2.2. Pembangunan atau Pengembangan Terminal Khusus
	2.3. Pengoperasian Terminal Khusus
	3. Izin Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/TUKS
	3.1. Penetapan Lokasi TUKS
	3.2. Pembangunan atau Pengembangan TUKS
	3.3. Pengoperasian TUKS

4. Izin . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

NO	PERIZINAN BERUSAHA
	4. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perairan 4.1. Usaha Bongkar Muat 4.2. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi 4.3. Usaha Tally Mandiri 4.4. Depo Peti Kemas 4.5. Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Jasa Terkait dengan Angkutan Laut 4.6. Pengoperasian Peralatan Bongkar Muat di Pelabuhan 4.7. Usaha Angkutan Multimoda 4.8. Usaha Keagenan Kapal 5. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau 5.1. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau 5.2. Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 6. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan 6.1. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan 6.2. Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan 7. Izin Pembukaan Kantor Cabang Usaha Angkutan Laut 8. Izin Usaha Suplai Bahan Bakar Minyak di Pelabuhan 9. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal 10. Izin Keruk dan Reklamasi 10.1. Kegiatan Kerja Keruk 10.2. Lokasi Reklamasi 10.3. Kegiatan Kerja Reklamasi
II.	Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan Izin Layak Operasi Insinerator
III.	Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan 1. Surat Izin Usaha Perdagangan Penanaman Modal Asing 2. Izin Usaha Kawasan 3. Persetujuan Impor 4. Izin Importir Terdaftar

5. Izin . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

NO	PERIZINAN BERUSAHA
	5. Izin Eksportir Terdaftar 6. Surat Keterangan Asal 7. Rekomendasi Pengeluaran Sementara ke TLDDP 8. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Perdagangan
IV.	Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian 1. Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing (PMA) 2. Izin Usaha Kawasan Industri PMA 3. Izin Perluasan Kapasitas Industri PMA 4. Izin Usaha Kawasan Luar Daerah Pabean, Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Kontraktor Kontrak Kerja Sama, dan Izin Usaha Sementara untuk Keperluan Tertentu 5. Persetujuan Pemasukan Barang Industri 6. Persetujuan Pengeluaran Barang Industri 7. Persetujuan Peluncuran Kapal di Luar Pelabuhan yang Ditunjuk 8. Izin Perluasan Kawasan Industri
V.	Perizinan Berusaha Sektor Sumber Daya Air, Limbah, dan Lingkungan 1. Izin Usaha Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Izin Usaha Penggunaan Sumber Daya Air 3. Izin Penggunaan atau Pengambilan Air Baku 4. Izin Operasional Instalasi Pengelolaan Air Bersih 5. Izin Pemanfaatan Air Limbah 6. Izin Operasional Instalasi Pengelolaan Limbah Cair Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 7. Izin Pemanfaatan Limbah B3 8. Izin Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu
VI.	Perizinan Berusaha Sektor Kehutanan 1. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam 2. Izin Usaha Pengelolaan Sarana Wisata Alam 3. Izin Usaha Pengelolaan Jasa Pariwisata Alam

4. Izin . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

NO	PERIZINAN BERUSAHA
	4. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan 5. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan 6. Izin Pemungutan Hasil Hutan 7. Izin Usaha Sarana Pariwisata Alam 8. Izin Pemanfaatan Air dan Energi Air di Hutan Konservasi 9. Izin Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus
VII.	Perizinan Berusaha Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 1. Izin Usaha Wilayah Kelistrikan 2. Izin Kegiatan Pencampuran (<i>Blending</i>) Bahan Bakar Minyak
VIII.	Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan 1. Izin Lokasi Reklamasi di Wilayah Pesisir 2. Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir 3. Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 250319 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS**

**JENIS PERSYARATAN DASAR SERTA SEKTOR PERSYARATAN DASAR,
PERIZINAN BERUSAHA, DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG
KEGIATAN USAHA DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

A. JENIS PERSYARATAN DASAR

NO	JENIS
1.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)
2.	Persetujuan Lingkungan (PL)
3.	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)

**B. SEKTOR PERSYARATAN DASAR, PERIZINAN BERUSAHA, DAN PERIZINAN
BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**

NO	SEKTOR
1.	Kelautan dan Perikanan
2.	Pertanian
3.	Kehutanan
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Perindustrian
6.	Perdagangan dan Metrologi Legal
7.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8.	Transportasi
9.	Kesehatan Obat dan Makanan

10. Pariwisata . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

NO	SEKTOR
10.	Pariwisata
11.	Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
12.	Ekonomi Kreatif
13.	Informasi Geospasial
14.	Perkoperasian
15.	Penanaman Modal
16.	Lingkungan Hidup

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum, -



Lydia Silvanna Djaman